

PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR JASA PASCAKEBIJAKAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI BANTEN (PERIODE TAHUN 2001–2011)

Muhammad Findi Alexandi^{*)1} dan Ovilla Marshafeni^{**)2}

^{*)} Center for Islamic Business and Economic Studies (CIBEST), Institut Pertanian Bogor
Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16144

^{**)2} Departemen Ilmu Ekonomi IPB, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the conditions of employment and the factors that affect employment in agriculture and services in the province of Banten. The method used was descriptive analysis and regression analysis of panel data. The estimation results showed that all variable of the minimum wage in districts/ cities, consumption, investment, and gross regional domestic product (GDP) significantly affect employment in agriculture and services in the province of Banten. Factors affecting employment in agriculture and the service sector in the province of Banten are as follow: First, the agricultural sector model estimation results indicate that UMK variable, consumption, investment, and GDP have significant effect on employment in the agricultural sector. Second, the service sector model estimation results indicate that UMK variable, consumption, investment, and GDP have significant effect on employment in the agricultural sector. Therefore, the Government of Banten Province is expected to increase the growth rate and GDP contribution of the agricultural sector and the service sector, taking into account the level of wages and observing conditions of employment in that sector.

Keywords: agriculture sector, labor, employment, GDP, Banten

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi ketenagakerjaan dan faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan jasa di Provinsi Banten. Metode yang digunakan analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Hasil estimasi semua variabel upah minimum kabupaten/kota, konsumsi, investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan jasa di Provinsi Banten. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor jasa di Provinsi Banten adalah sebagai berikut. Pertama, hasil estimasi model sektor pertanian menunjukkan bahwa variabel UMK, konsumsi, investasi, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Kedua, hasil estimasi model sektor jasa menunjukkan bahwa variabel UMK, konsumsi, investasi, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian dan sektor jasa, memperhitungkan tingkat upah, dan memerhatikan kondisi lapangan pekerjaan di sektor tersebut.

Kata kunci: sektor pertanian, tenaga kerja, upah minimum, PDRB, Banten

¹ Alamat Korespondensi:

Email: muhammadfindi73@yahoo.com

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam masalah pembangunan. Penyerapan tenaga kerja diperlukan dalam distribusi pendapatan yang nantinya akan berdampak pada pembangunan. Pendapatan yang diperoleh masyarakat, hampir seluruhnya berasal dari upah yang diberikan dilapangan pekerjaan. Jumlah pendapatan yang

diterima tenaga kerja tersebut menentukan besarnya kemakmuran dari suatu masyarakat. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu masyarakat maka semakin tinggi tingkat kemakmurannya. Suatu proses pembangunan melakukan perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional yang juga tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000).

Selama periode 2003–2011, jumlah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas atau penduduk usia kerja, terus mengalami peningkatan dari 152,65 juta jiwa menjadi 171,76 juta jiwa. Tahun 2003–2011, peningkatan jumlah penduduk usia kerja tersebut mendorong pertumbuhan angkatan kerja dari 100,32 juta jiwa menjadi 117,76 juta jiwa (Tabel 1).

Peraturan Menteri Tenaga kerja No.PER03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regional Bab I Pasal 1 ayat (a) menyebutkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap di wilayah tertentu dalam suatu provinsi. Tingkat UMR dibagi menjadi tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kebijakan upah minimum hanya dikenakan pada pekerja *unskill* atau buruh khususnya pada sektor jasa. Tujuan penetapan kebijakan ini adalah melindungi pekerja agar upah yang dibayarkan tidak lebih rendah dari tingkat upah minimum yang ditetapkan sehingga menjamin kemakmuran bagi tenaga kerja. Upah minimum juga bertujuan meningkatkan produktivitas. Penetapan tingkat upah akan mendorong para buruh untuk mengikuti berbagai program yang dapat mengasah keterampilan dan pengetahuannya sehingga meningkatkan produktivitas.

Penetapan kebijakan upah minimum dapat meningkatkan jumlah pengangguran. Selain itu, kebijakan tersebut meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan pada perusahaan jasa sehingga berdampak pada kenaikan harga per unit barang yang diproduksi. Kenaikan harga akan mengurangi jumlah permintaan sehingga banyak produk yang tidak terjual. Hal ini menyebabkan produsen harus menurunkan jumlah produksinya dan dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan jasa.

Tingkat pengangguran di Provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2008–2010 mencapai 15,18% dan turun menjadi 13,06% (Tabel 2). Walaupun mengalami penurunan, tingkat pengangguran di Provinsi Banten tetap menempati posisi pertama di Pulau Jawa. Pembentukan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola pemerintahannya sendiri.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai tingkat upah minimum yang kewenangannya dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada kenaikan tingkat upah minimum yang mengalami peningkatan di tiap provinsi dari tahun ke tahun (Tabel 3). Periode 2008–2011, seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa menetapkan UMP yang cenderung meningkat. Peningkatan upah juga disebabkan oleh penyesuaian dengan tingkat inflasi sehingga pekerja tidak mengalami penurunan kesejahteraan.

Tabel 1. Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, jumlah angkatan kerja, dan jumlah pengangguran di Indonesia (jiwa)

Tahun	Usia >15	Angkatan kerja	Pengangguran
2003	152.649.981	100.316.007	9.531.090
2004	153.948.922	103.973.387	10.251.351
2005	158.491.396	105.857.653	11.899.266
2006	160.811.498	106.388.935	10.932.000
2007	164.118.323	109.941.359	10.011.142
2008	166.641.050	111.947.265	9.394.515
2009	169.328.208	113.833.280	8.962.617
2010	172.070.339	116.527.546	8.319.779
2011	171.756.077	117.370.485	7.700.086

Sumber: BPS, 2011.

Tabel 2. Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di Pulau Jawa (%)

Provinsi	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
Banten	15,18	14,97	13,68	13,06
Jakarta	12,16	12,15	11,05	10,80
Jawa Barat	12,08	10,96	10,33	9,83
Jawa Timur	6,42	5,08	4,25	4,16
Jawa Tengah	7,35	7,33	6,21	5,93
DI Yogyakarta	5,38	6,00	5,69	3,97
Pulau Jawa	10,12	9,24	8,39	7,38

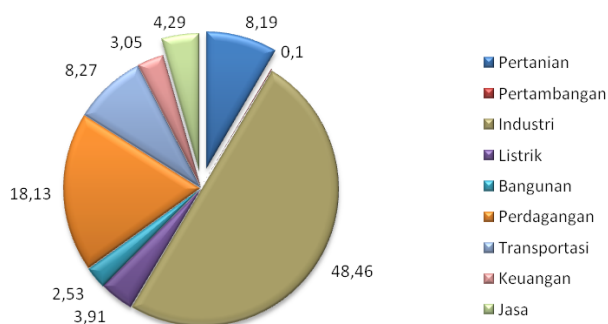
Tabel 3. Jumlah upah minimum provinsi di Pulau Jawa (Rp)

Provinsi	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
DKI Jakarta	972.604	1.069.865	1.118.009	1.290.000
Banten	837.000	917.500	955.300	1.000.000
Jawa Timur	586.000	570.000	630.000	705.000
Jawa Barat	568.193	628.191	671.500	732.000
Jawa Tengah	547.000	575.000	660.000	675.000
Yogyakarta	586.000	700.000	745.695	808.000

Sumber: Kemenakertrans, 2011.

Provinsi Banten merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Sektor industri memberikan kontribusi yang besar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten selama periode 2001–2011 (Gambar 1). Sektor industri memberikan kontribusi PDRB terbesar dengan rata-rata 48,46% pada tahun 2002–2011, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi sebesar 18,13%. Sektor pertanian dan sektor transportasi memiliki kontribusi yang hampir sama, yaitu berkisar 8%. Kontribusi sektor jasa sebesar 4,29% sedangkan listrik, bangunan, dan keuangan merupakan sektor yang memiliki nilai kontribusi PDRB terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Sementara itu, sektor pertambangan memiliki rata-rata kontribusi terkecil sebesar 0,10%.

Menurut BPS (2003) pertanian adalah semua kegiatan yang meliputi penyediaan komoditas tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang dilakukan secara sederhana dengan menggunakan peralatan tradisional. Sektor pertanian terdiri atas lima subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan hasilnya, dan subsektor perikanan. Sektor jasa memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia selama masa pemulihan pascakrisis keuangan asia. Pada saat ini, sektor jasa merupakan sektor terbesar dari sektor-sektor yang utama, lebih besar dari kombinasi sektor pertanian dan manufaktur. Sektor ini menyediakan lebih banyak pekerjaan dari pada sektor lainnya sejak pertengahan tahun 2000. Nilai *output* sektor jasa meningkat lebih dari dua kali lipat nilai *output* jasa yang dicatat sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan pada tahun 2000. Jasa terdiri atas dua subsektor, yaitu subsektor



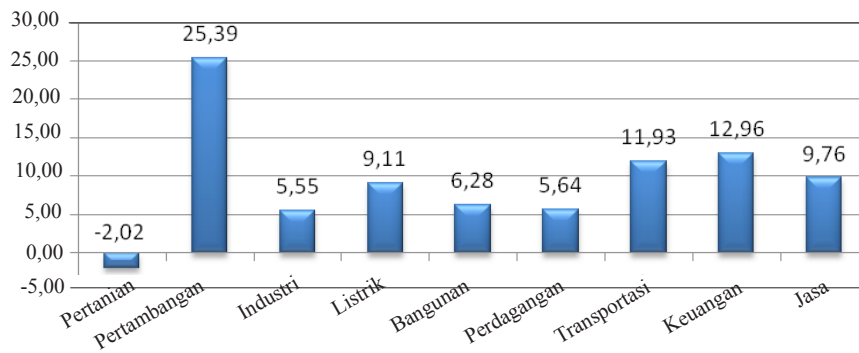
Gambar 1. Rata-rata kontribusi produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha atas harga dasar konstan 2000 di Provinsi Banten periode 2001–2011(%)(BPS, 2011).

pemerintahan umum dan subsektor swasta. Subsektor swasta terdiri atas sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, serta perumahan dan rumah tangga. (ILO, 2011).

Besarnya kontribusi PDRB yang dimiliki seharusnya dapat berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja. Hukum Okun menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dengan *Gross Domestic Bruto* (GDP). Tingkat pengangguran dengan GDP riil memiliki hubungan yang negatif (Mankiw, 2007). Sesuai pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesempatan kerja dan GDP riil.

Sektor pertanian dan sektor jasa memiliki kontribusi PDRB besar, tetapi tidak memiliki laju penyerapan tenaga kerja yang baik jika dibanding sektor lain dengan nilai kontribusinya lebih rendah. Laju penyerapan tenaga kerja tertinggi dimiliki oleh sektor pertambangan dengan rata-rata sebesar 25,39% (Gambar 2). Selain itu, sektor pertanian memiliki laju penyerapan tenaga kerja terendah dibanding sektor-sektor lainnya dengan rata-rata sebesar -2,02%. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja di sektor pertanian sangat lemah. Sektor jasa hanya memiliki rata-rata laju penyerapan sebesar 9,76%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan sektor pertambangan dan keuangan yang mampu memiliki rata-rata laju penyerapan tenaga kerja di atas sektor jasa. Penyerapan tenaga kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada pada setiap unit usaha atau lapangan pekerjaan (Kemenakertrans, 2011). Tenaga kerja akan terserap apabila jumlah unit usaha atau lapangan pekerjaan mencukupi dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Lapangan pekerjaan merupakan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat orang bekerja (Kemenakertrans, 2011).

Setiap sektor perekonomian atau lapangan pekerjaan memiliki daya serap tenaga kerja dan laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja serta terjadinya perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun perannya dalam pendapatan nasional (Simanjutak, 1998). Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor jasa di Provinsi Banten dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor jasa pascakebijakan upah minimum.



Gambar 2. Rata-rata laju penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di Provinsi Banten Periode 2001–2011 (%) (BPS Banten dan Kemenakertrans Banten, 2011)

Penelitian ini akan membahas mengenai kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data *cross section* delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan serta data *time series* selama 10 tahun dari tahun 2001–2011. Adapun data-data yang digunakan sebagai variabel dalam pemodelan, yaitu jumlah tenaga kerja disektor pertanian dan jumlah tenaga kerja disektor jasa, upah minimum kabupaten (UMK), PDRB, pengeluaran per kapita, dan investasi. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), perpustakaan, jurnal ilmiah, dan buku teks yang relevan dengan penelitian ini. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, Upah Minimum Kabupaten (UMK), Investasi, dan Konsumsi. Objek dari penelitian ini adalah Provinsi Banten dengan kurun waktu yang digunakan data penelitian ini adalah 2001-2011.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi data panel. Analisis perkembangan kondisi ketenagakerjaan di sektor pertanian dan sektor jasa menggunakan analisis deskriptif sedangkan analisis regresi data panel digunakan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan jasa di Provinsi Banten. Selain itu, variabel-variabel yang memengaruhi penyerapan

tenaga kerja sektor pertanian dan jasa, juga dianalisis dalam penelitian ini. Pengolahan data menggunakan *Eviews 6.1* dan *Microsoft Excel 2007*.

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan situasi ketenagakerjaan sektor pertanian dan jasa dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Setelah itu, deskripsi variabel-variabel yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, seperti PDRB, upah riil, investasi, dan pengeluaran per kapita dibahas pada penelitian ini.

Data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu (Gujarati, 2004). Menurut Baltagi (2005), keunggulan dari menggunakan analisis data panel antara lain sebagai berikut: 1) mengontrol heterogenitas data individual dalam suatu periode waktu; 2) memberikan informasi yang lebih luas, mengurangi kolinearitas di antara variabel, memperbesar derajat bebas, dan lebih efisien; 3) dapat menentukan perubahan dinamis (*dynamic of adjustment*); 4) mengidentifikasi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang tidak terdeteksi dalam data *cross section* dan *time series* saja; 5) digunakan untuk membuat dan menguji model perilaku yang lebih kompleks dibandingkan analisis data *cross section* atau *time series* murni; dan 6) meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit data yang digunakan lebih banyak. Keunggulan data panel tersebut menunjukkan bahwa data panel membuat peneliti lebih fleksibel dalam memodelkan perbedaan sifat tiap data pengamatan dibandingkan dengan metode *cross section* maupun *time series* lainnya.

Model data panel menggunakan data *time series* adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

Simbol T menjelaskan banyaknya data *time series*, sedangkan model data panel menggunakan data *cross section* adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

Simbol N adalah banyaknya data *cross section*. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* maka model panel data dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it}$$

Tujuan pembangunan yang merata di segala aspek terutama ketenagakerjaan, menuntut pemerintah untuk mampu menyediakan lapangan kerja dengan jumlah dan kualitas yang sesuai. Kebijakan-kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk dapat menjamin taraf kehidupan yang layak bagi tenaga kerjanya melalui tingkat upah. Salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah adalah kebijakan upah minimum. Kebijakan penetapan upah minimum dilakukan untuk melindungi para pekerja dari pemberian upah rendah. Akan tetapi, kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Kenaikan upah minimum menyebabkan kenaikan biaya yang harus dikeluarkan pada perusahaan manufaktur. Akibatnya, perusahaan harus mengurangi biaya tersebut dengan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menghindari kerugian karena meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, kebijakan tersebut dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur dan banyak pekerja yang beralih ke sektor lain.

Permasalahan tingginya jumlah pengangguran dialami oleh salah satu daerah otonom, yaitu Provinsi Banten. Tingkat pengangguran di Provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2010 mencapai 13,06%. Provinsi Banten merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa dengan tingkat pertumbuhan mencapai 11,1% pada tahun 2006–2010. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

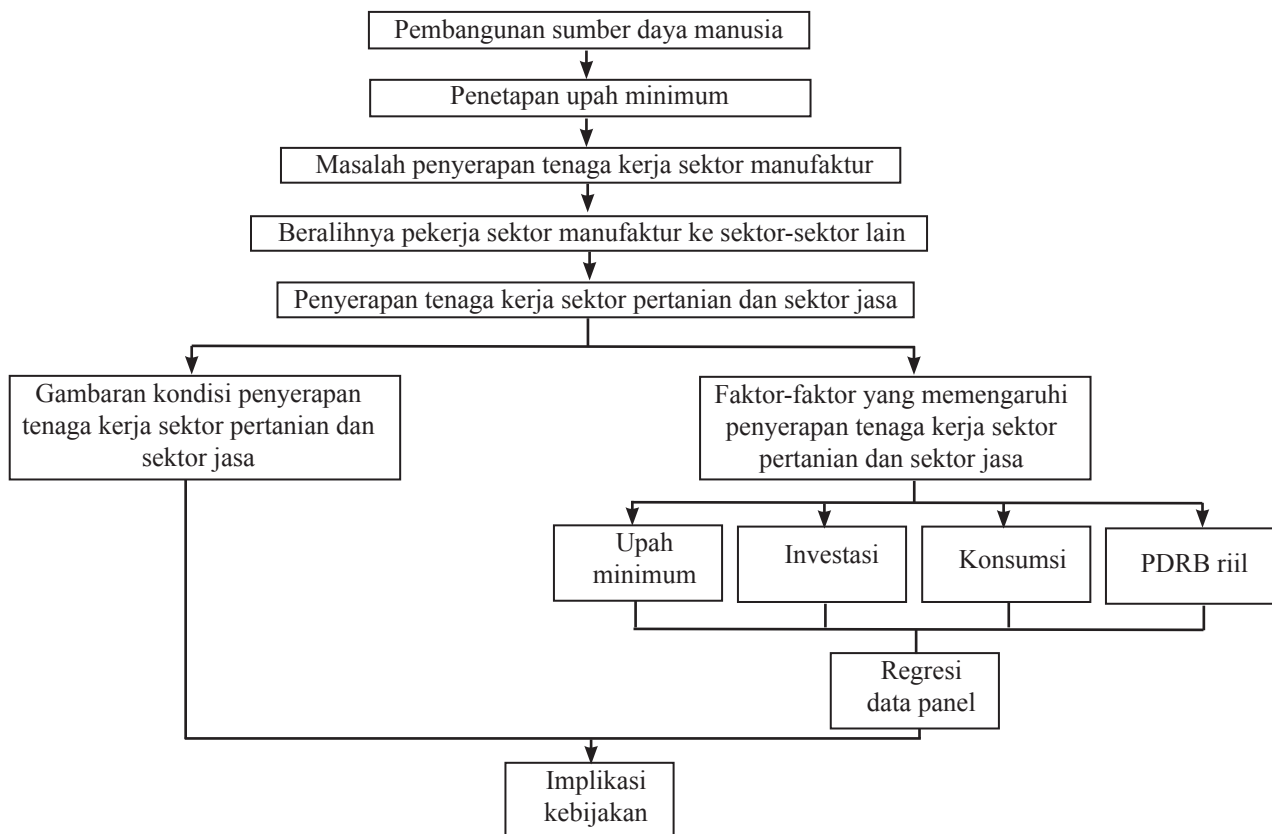
Hukum Okun menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP. Tingkat pengangguran dengan GDP riil memiliki hubungan yang negatif (Mankiw, 2007). Hasil pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesempatan kerja dengan GDP riil. Sektor pertanian dan sektor jasa yang memberikan kontribusi besar pada PDRB belum mampu memiliki laju penyerapan tenaga kerja yang baik dibandingkan sektor lain. Sektor pertanian memiliki laju penyerapan tenaga kerja terendah dengan rata-rata sebesar -2,02%, sedangkan sektor jasa hanya memiliki rata-rata laju penyerapan sebesar 9,76%. Kedua sektor ini diharapkan mampu memperluas kesempatan kerjan sehingga dapat menampung penawaran tenagakerja pascakebijakan upah minimum sektor manufaktur dan mengurangi masalah pengangguran yang ada. Kerangka pemikiran penelitian selengkapny dapat dilihat pada Gambar 3.

HASIL

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Sektor Jasa

Proses pembagunan ekonomi memerlukan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Penggunaan SDM dalam pembangunan menjadi hal yang penting karena pertumbuhan ekonomi diciptakan dari SDM yang berkualitas. Perluasan lapangan pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja yang produktif dengan pemberian upah yang layak juga memengaruhi terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upah yang layak dapat meningkatkan pendapatan pekerja yang berdampak pada daya beli sehingga meningkatkan permintaan efektif.

Penetapan kebijakan otonomi daerah terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur tingkat upah. Kebijakan upah minimum regional merupakan salah satu regulasi pemerintah yang bertujuan agar tenaga kerja dapat memperoleh upah yang layak. Kebijakan upah minimum dirasakan menguntungkan dari sisi penawaran tenaga kerja karena akan memperoleh upah di atas tingkat upah minimum yang telah ditetapkan. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya penawaran tenaga kerja. Melihat dari sisi permintaan, hal yang terjadi adalah sebaliknya. Upah merupakan bagian dari biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan biaya yang



Gambar 3. Kerangka pemikiran penelitian

dikeluarkan perusahaan tersebut. Salah satu jalan supaya biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak melebihi keuntungan yang diperolehnya adalah dengan mengurangi permintaan tenaga kerja. Hal ini akan berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Jawa (Tabel 2). Tingkat pengangguran Provinsi Banten periode 2008–2011 mengalami penurunan dari 15,18% menjadi 13,06%, namun angkanya tetap tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Tingginya angka pengangguran terbuka menunjukkan bahwa terdapat masalah penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi di Provinsi Banten. Tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten diduga karena kualitas pertumbuhan ekonomi Banten yang belum optimal dan kualitas SDM yang masih terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang kurang dipacu oleh pertumbuhan investasi, memiliki dampak pada penyerapan tenaga kerja yang terbatas. Rendahnya kualitas SDM dilihat dari tingginya angkatan kerja yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah dan budaya masyarakat yang belum berorientasi kepada daya saing dan produktivitas.

Kontribusi suatu sektor dalam pembentukan PDRB daerah, menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. PDRB memiliki

hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Hal ini berarti, semakin tinggi nilai PDRB maka pengangguran akan berkurang. Berkurangnya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa sektor tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap kelebihan penawaran tenaga kerja yang terjadi. Pertanian dan jasa merupakan dua sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB total di Provinsi Banten (Gambar 1). Periode 2001–2011, sektor pertanian memiliki rata-rata kontribusi sebesar 8,19% dan sektor jasa sebesar 4,29%.

Hasil Estimasi Model dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Periode 2001–2011

Hasil estimasi menunjukkan nilai-p F-stat sebesar 0,000000 lebih kecil dari alpha 5%. Hal ini menunjukkan uji-F signifikan pada taraf nyata 5%, yang berarti minimal ada satu peubah bebas berpengaruh nyata dalam model penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sehingga model penduga sudah layak untuk menduga parameter yang ada dalam fungsi. Nilai *R-Squared* (R^2) *weighted* atau koefisien determinasi menunjukkan keragaman tenaga kerja di sektor pertanian dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, yaitu upah minimum, konsumsi,

investasi, dan PDRB sebesar 99,9865%, sedangkan sisanya 0,0135% dijelaskan oleh variabel lain di luar model (Tabel 4).

Model persamaan regresi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian data panel terbaik yang didapatkan dari hasil pengolahan dengan model *fixed effect* adalah sebagai berikut:

$$\ln TK = 1,034305 - 0,357867 \ln UMK_{it} + 1,851248 \ln KON_{it} - 0,003978 \ln INV_{it} + 0,194856 \ln PDRB_{it} + e_{it}$$

Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian adalah upah minimum, konsumsi, investasi, dan PDRB. Variabel upah minimum berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dari nilai-p t-stat, yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien upah minimum yang dihasilkan sebesar -0,357867. Artinya, peningkatan upah minimum sebesar 1% akan menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 0,357867% (*ceteris paribus*) dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sitanggang dan Nachrowi (2004). Sektor pertanian cenderung menawarkan tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor manufaktur. Kenaikan upah minimum di sektor manufaktur, tidak membuat pekerja tertarik untuk bekerja di sektor pertanian. Tingkat upah yang relatif rendah menjadi salah satu faktor kurangnya minat pekerja untuk bekerja di sektor pertanian sehingga berakibat pada penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Tabel 4. Hasil estimasi model penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Banten periode 2001–2011

Variable	Coefficient	Prob.
UMK	-0,357867	0,0000*
KON	1,851248	0,0000*
INV	-0,003978	0,0061*
PDRB	0,194856	0,0000*
C	1,034305	0,0000
<i>Weighted Statistics</i>		
R-squared	0,999865	
Prob (F-statistic)	0,000000	
Sum squared resid	83,24834	
Durbin-Watson stat	1,964762	
<i>Unweighted Statistics</i>		
R-squared	0,994029	
Sum squared resid	9,859344	

Keterangan: (*) signifikan pada taraf 5%.

Variabel konsumsi berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dari nilai-p t-stat, yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien konsumsi yang dihasilkan sebesar 1,851248. Artinya, peningkatan konsumsi sebesar 1% akan menaikkan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 1,851248% (*ceteris paribus*) dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian Mahyuddin dan Majdah (2010) dan teori Harrod-Domar mengenai pengeluaran masyarakat.

Variabel investasi berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dari nilai-p t-stat, yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien investasi yang dihasilkan adalah sebesar -0,003978 yang artinya peningkatan investasi sebesar 1% akan menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 0,003978% (*ceteris paribus*) dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal dimana investasi berpengaruh positif dengan penyerapan tenaga kerja.

Variabel PDRB sektor pertanian berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dari nilai-p t-stat yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien PDRB yang dihasilkan adalah sebesar 0,194856, yang artinya peningkatan PDRB sektor pertanian sebesar 1% akan menaikkan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 0,194856% (*ceteris paribus*) dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian Siregar dan Sukwika (2007), Hukum Okun, dan teori Harrod Domar yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja.

Hasil Estimasi Model dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Jasa Periode 2001–2011

Model persamaan regresi penyerapan tenaga kerja di sektor jasa data panel terbaik diperoleh dari hasil pengolahan dengan model *fixed effect* adalah sebagai berikut:

$$\ln TK = -0,011468 + 0,355376 \ln UMK_{it} + 0,416579 \ln KON_{it} + 0,016880 \ln INV_{it} + 0,259603 \ln PDRB_{it} + e_{it}$$

Variabel upah minimum berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor jasa (Tabel 5). Hal ini ditunjukkan dari nilai-p t-stat, yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien upah minimum yang dihasilkan adalah sebesar 0,355376, yang artinya peningkatan upah minimum sebesar 1% akan menaikkan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor jasa sebesar 0,355376% (*ceteris paribus*) dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Sektor jasa memiliki dua subsektor, yaitu subsektor pemerintahan umum dan subsektor swasta. Subsektor swasta terdiri atas jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tenaga kerja sektor jasa di Provinsi Banten adalah padat karya. Kenaikan upah minimum di sektor manufaktur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor ini karena jasa merupakan sektor yang *output*-nya berupa jasa. Peran tenaga kerja tidak dapat digantikan oleh mesin atau teknologi dan perannya dibutuhkan dalam menghasilkan *output* di sektor jasa.

Variabel konsumsi berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor jasa. Hal ini ditunjukkan dari nilai-p t-stat, yaitu 0,0028 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien konsumsi yang dihasilkan adalah sebesar 0,416579. Artinya, peningkatan konsumsi sebesar 1% akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor jasa sebesar 0,416579% (*ceteris paribus*) dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hal ini sesuai dengan teori Harrod-Domar mengenai pengeluaran masyarakat. Koefisien estimasi variabel konsumsi di sektor jasa lebih kecil dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki nilai koefisien sebesar 1,851248, sedangkan sektor jasa sebesar 0,416579. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi yang dikeluarkan masyarakat lebih besar untuk sektor pertanian, seperti konsumsi makanan. Tabel 6 menunjukkan laju pertumbuhan konsumsi makanan dan konsumsi nonmakanan selama periode 2008-2011. Rata-rata laju pertumbuhan konsumsi makanan mencapai 13,76% lebih besar dibandingkan konsumsi nonmakanan (12,14%).

Variabel investasi berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor jasa. Hal ini ditunjukkan dari nilai-p t-stat, yaitu 0,0001 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien investasi

sebesar 0,016880 yang artinya peningkatan investasi sebesar 1% akan menaikkan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor jasa sebesar 0,016880% (*ceteris paribus*) dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hal ini sesuai dengan teori penyerapan tenaga kerja yang salah satu faktor utamanya adalah investasi.

Investasi dapat dijadikan modal untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam perluasan lapangan pekerjaan yang ada. Pembelanjaan penunjang untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, serta bangunan pabrik dan lainnya yang nantinya digunakan untuk mendirikan perusahaan dan perbaikan bagi kinerja perusahaan tersebut. Selain itu, investasi akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan nasional karena investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional atau PDB, yaitu $Y = C + I + G + NX$. Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi pada sektor jasa lebih bersifat padat karya atau *labour* intensif. Hal ini berarti, investasi digunakan sepenuhnya untuk menunjang tenaga kerja di sektor jasa. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sektor jasa dan sektor pertanian memiliki jenis komoditas yang berbeda. Komoditas sektor pertanian dapat ditingkatkan kualitasnya dengan penggunaan teknologi, sedangkan produk yang dihasilkan sektor jasa tidak terlalu berpengaruh terhadap penggunaan teknologi karena *output*-nya berupa jasa yang secara langsung dihasilkan pekerja.

Tabel 5. Hasil estimasi model penyerapan tenaga kerja sektor jasa di Provinsi Banten periode 2001–2011

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Prob.</i>
UMK	0,355376	0,0000*
PDRB	0,259603	0,0000*
KON	0,416579	0,0028*
INV	0,016880	0,0001*
C	-0,011468	0,8507
<i>Weighted statistics</i>		
R-squared	0,999237	
Prob (F-statistic)	0,000000	
Sum squared resid	87,16565	
Durbin-Watson stat	1,990026	
<i>Unweighted statistics</i>		
R-squared	0,996025	
Sum squared resid	6,179652	

Keterangan: (*) signifikan pada taraf 5%.

Tabel 6. Laju pertumbuhan konsumsi makanan dan nonmakanan di Provinsi Banten (%)

Tahun	Makanan	Nonmakanan
2008	8,36	2,95
2009	14,71	13,74
2010	21,31	26,62
2011	10,68	5,23
Rata-rata	13,76	12,14

Sumber: BPS, 2011.

Variabel PDRB sektor jasa berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penyerapan tenaga kerja sektor jasa. Hal ini ditunjukkan dari nilai-p t-stat, yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%). Nilai koefisien PDRB sektor jasa yang dihasilkan sebesar 0,259603. Artinya, peningkatan PDRB sektor jasa sebesar 1% akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa sebesar 0,259603% (*ceteris paribus*) dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hal ini sesuai dengan Hukum Okun dan teori Harrod Domar yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Koefisien estimasi dari PDRB sektor jasa lebih kecil dibandingkan dengan koefisien estimasi sektor pertanian. Sektor jasa memiliki koefisien sebesar 0,259603, sedangkan sektor pertanian sebesar 0,194856. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi yang lebih besar dalam pembentukan PDRB dibandingkan dengan sektor jasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar di Provinsi Banten selama periode 2001–2001, tetapi terus mengalami penurunan hingga tahun 2011. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor jasa di Provinsi Banten adalah sebagai berikut. Hasil estimasi model sektor pertanian menunjukkan bahwa variabel UMK, konsumsi, investasi, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Variabel UMK dan investasi memiliki hubungan yang negatif dengan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sedangkan variabel konsumsi dan PDRB memiliki hubungan yang positif. Hasil estimasi model sektor jasa menunjukkan bahwa variabel UMK, konsumsi, investasi,

dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja di sektor jasa.

Saran

Saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah pemerintah Provinsi Banten diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian dan sektor jasa. Hal tersebut dilakukan dengan upaya mempermudah akses untuk meringankan dan mengembangkan bisnis di sektor jasa dan pembangunan infrastruktur di sektor pertanian yang berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di kedua sektor. Di samping itu, pemerintah Provinsi Banten diharapkan lebih memperhitungkan tingkat upah dengan menyesuaikannya kebutuhan hidup minimum para pekerja. Salah satu alasan sektor pertanian banyak ditinggalkan tenaga kerja adalah tingkat upah yang rendah. Pemberian upah yang optimal, diharapkan mampu meningkatkan minat pekerja untuk bekerja di sektor pertanian. Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, baik untuk konsumsi makanan maupun nonmakanan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan yang disesuaikan dengan kondisi inflasi dan pemberian upah yang optimal. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Banten diharapkan memerhatikan kondisi lapangan pekerjaan di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan yang memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor jasa. Keempat variabel *independent* dalam penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah provinsi dalam membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kondisi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dan sektor jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Kota Tangerang Selatan dalam Angka*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Kabupaten Pandeglang dalam Angka*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Kabupaten Tangerang dalam Angka*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Kabupaten Lebak dalam Angka*. Jakarta: BPS.

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Kabupaten Serang dalam Angka*. Jakarta: BPS
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Kota Cilegon dalam Angka*. Jakarta: BPS
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Kota Tangerang dalam Angka*. Jakarta: BPS
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2003. *Statistik Pertanian Indonesia*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. *Kota Serang dalam Angka*. Jakarta: BPS.
- Baltagi BH. 2005. *Econometrics Analysis of Panel Data*. England: John Willey & Sons Ltd.
- [ILO] International Labour Organization. 2011. *Perdagangan dan Pekerjaan di Sektor Jasa Indonesia*. Jakarta: ILO.
- Gudjarati D. 2004. *Ekonometrika Dasar*. Zain Sumarno dan Zein [penerjemah]. Jakarta: Erlangga.
- [Kemenakertrans] Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. 2001-2011. *Situasi Kerja dan Kesempatan Kerja Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten*. Banten: Kemenakertrans.
- Mahyuddin, Majdah MZ. 2010. Elastisitas permintaan tenaga kerja dan kekauan upah riil sektoral di Sulawesi Selatan. *Jurnal Agro Ekonomi* 28(2): 113–132
- Mankiw GN. 2007. *Teori Makroekonomi*. Edisi ke-6. Nurmawan [penerjemah]. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Tenaga kerja No. PER03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regional.
- Simanjuntak PJ. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: FE UI.
- Siregar H, Sukwika T. 2007. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pasar tenaga kerja dan implikasi kebijakannya terhadap sektor-sektor pertanian di Kabupaten Bogor. *Socio-Economic Of Agriculture And Agribusiness* 7(3):1–22.
- Sitanggang IR, Nachrowi ND. 2004. Pengaruh struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektoral: analisis model demometrik di 30 Provinsi pada 9 sektor di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 5(1): 83-102.
- Todaro S. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ke-7. Munandar [penerjemah]. Jakarta: IPB Press.